



# **LAPORAN KINERJA (LKj) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018**



**NOMOR : LAP.700/06/ITPROV-1.1/I/2019  
Tanggal : 22 Januari 2019**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	1
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	.....	2 - 3
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang	.....	4 - 5
B. Kedudukan	.....	5 - 6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	.....	6 - 7
C. Struktur Organisasi	.....	7 - 12
D. Lingkungan Strategis yang berpengaruh	.....	12 - 13
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>		
A. Pernyataan Visi	.....	14
B. Pernyataan Misi	.....	15
C. Tujuan dan Sasaran	.....	16
D. Strategi dan Kebijakan	.....	16 - 18
E. Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	18 - 19
F. Perjanjian Kinerja	.....	20 - 23
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	24 - 44
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	.....	45
<b>LAMPIRAN :</b>		
1. Perjanjian Kinerja Th. 2018		
2. Perjanjian Kinerja Th. 2019		
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)		
4. Rencana Aksi Kinerja Th. 2018		

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKj )  
TAHUN 2018**

# **LAMPIRAN :**

- **PERJANJIAN KINERJA TH. 2018**
- **PERJANJIAN KINERJA TH. 2019**
- **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- **RENCANA AKSI KINERJA TH. 2018**

# **BAB IV**

**“ PENUTUP ”**

## KATA PENGANTAR

Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bersama ini menyampaikan pelaporan kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

Pada prinsipnya laporan ini disampaikan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2019

**INSPEKTUR,**

**Dr. H. KAILANI, SH, M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198902 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: /Kep.Gub/Bappeda-2/2016. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Inspektur pembantu dan kelompok Jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **GAMBARAN SINGKAT**

---

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Provinsi Jambi disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **B. Kedudukan**

Secara hukum , nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi (ITPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat Provinsi Jambi tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga Teknis Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sembilan Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota.

Beban tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam tahun 2018 adalah dalam bidang Pengawasan umum yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Inspektur pembantu dan kelompok Jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaa administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan substansi di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengawasan yaitu: *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis*. Dimana kebijakan tersebut merupakan suatu perwujudan pelaksanaan misi pemerintah Provinsi Jambi yang salah satunya adalah :

*“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik ”.*

#### **D. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - Sub bagian administrasi keuangan dan umum

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektorat dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi.

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah;

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengawasan berdasarkan prioritas daerah dan aturan yang terkait;
- 2) Pengelola/menyusun anggaran Inspektorat;
- 3) Pengoordinasian penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- 4) Pengelola, mengevaluasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- 5) Penyusun data hasil pemeriksaan teknis fungsional sebagai bahan tindaklanjut;
- 6) Penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki tugas membantu Inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah I. Sedangkan Fungsi Irbanwil I yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayahnya;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil I pada tahun 2018 meliputi :

A. OPD Provinsi Jambi

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
4. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
5. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
7. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
8. Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
12. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
13. Biro Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi
14. Biro Humas Setda Provinsi Jambi

B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Sarolangun
3. Kabupaten Tebo
4. Kota Jambi

C. Kelompok Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

d. Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki tugas membantu Inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah II. Sedangkan Fungsi Irbanwil II adalah yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

- 4) Pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayahnya;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil II pada tahun 2018 meliputi :

A. OPD Provinsi Jambi

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan Provinsi Jambi
4. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
5. Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Jambi
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
7. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
8. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
9. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi
10. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
11. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
12. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
13. Biro Administrasi Pembangunan & Kerjasama
14. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat
15. Biro Perekonomian dan SDA

B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Batanghari
2. Kabupaten Merangin
3. Kota Sungai Penuh

C. Kelompok Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tugas membantu Inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah III. Sedangkan Fungsi Irbanwil III adalah yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayahnya;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irbanwil III pada tahun 2018 meliputi :

A. OPD Provinsi Jambi

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
2. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah Provinsi Jambi
8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
9. BAPPEDA Provinsi Jambi
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
11. Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
12. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
13. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
14. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

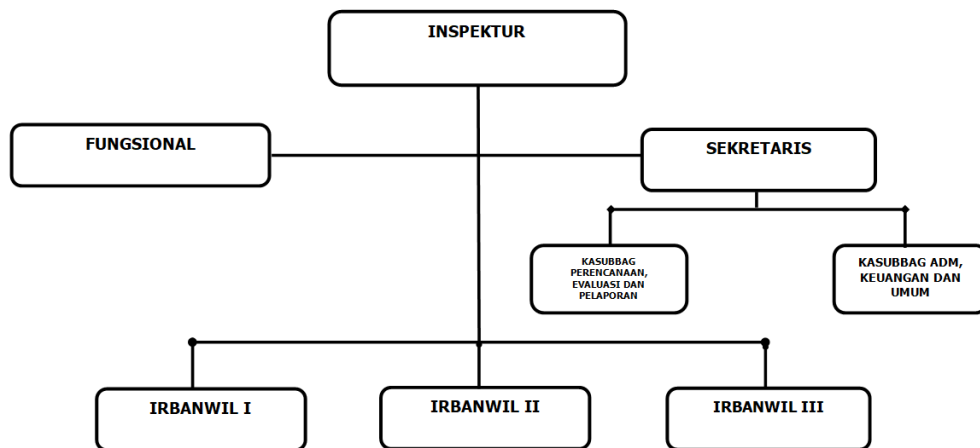
B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kabupaten Muaro Jambi



3. Kabupaten Bungo
  4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- C. Kelompok Jabatan Fungsional
- Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
  - Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2018



Sumber : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016

#### E. Lingkungan strategis yang berpengaruh

Lingkungan yang dihadapi APIP sangat dinamis, perubahan fundamental dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan dorongan bagi perubahan sistem pengawasan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan komitmen politik untuk pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah menegaskan sikap dan langkah yang harus dilakukan segenap jajaran aparat pemerintah.

Peran Inspektorat sebagai pengawas fungsional terhadap semua kebijakan pemerintah meliputi :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di segala bidang manajemen pemerintahan;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan. Peran ini sangat penting untuk mengawasi dan menjaga agar kebijakan yang telah diambil tidak menimbulkan distorsi/ penyimpangan.
3. Pengawasan terhadap pedoman-pedoman standar pelayanan masyarakat.

Kesimpulan atas perubahan lingkungan yang dihadapi APIP mengkonfirmasi dua tantangan utama, yaitu pencegahan dan pemberantasan KKN serta perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme APIP.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### RENCANA STRATEGIK

##### 1. VISI DAN MISI

---

#### **A. Pernyataan Visi**

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Dengan pengertian lain bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan visi organisasi yaitu:

***“ Mewujudkan Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mengawal Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 ”***

Dengan rumusan visi tersebut, diharapkan dapat menjadikan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai pengawal yang tangguh untuk mewujudkan Jambi Tuntas guna mencapai Visi Provinsi Jambi.

#### **Penjelasan Makna**

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna dan bebas KKN menjadi bagian dari perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan pentingnya tugas-tugas pengawasan maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan visi yang menitikberatkan pada Profesionalisme dan Integritas dalam pelaksanaan tugas.

## **B. Pernyataan Misi**

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.

Dengan misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan baik pengawasan, pembinaan maupun pemeriksaan akan tercipta suatu program secara terpadu bersinergi untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien, dengan didukung oleh terciptanya aparatur pengawasan yang bersih.

### ***Penjelasan Misi***

Maksud dari misi adalah bahwa kegiatan tugas-tugas pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud dengan baik.

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, APFP perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan secara continue (*Continuing Professional Education*) guna menciptakan APFP yang profesional. Kualitas hasil pengawasan harus ditingkatkan guna mempertahankan standar kerja dan meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja.

Kinerja pengawasan harus lebih ditingkatkan dilingkungan pemerintah melalui sinergi pengawasan berupa kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan berkelanjutan.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### C. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi dengan maksud agar dalam pelaksanaan menjadi lebih terarah. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka merealisasikan misi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Tersedianya Aparatur Pengawasan yang Profesional serta Tertatanya Kelembagaan Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### D. Sasaran

Sasaran merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi . Sasaran yang ditetapkan atau ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi.
- Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.
- Meningkatnya kualitas Aparatur Pengawasan yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas.

## 3. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

*Table 1 : Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi*

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>VISI : Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Tuntas 2021).</b>				
<b>MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>				
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Peningkatan intensitas pengawasan SKPD di Lingkup Provinsi Jambi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala	Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

2.	Tersedianya aparatur pengawasan yang profesional serta tertatanya kelembagaan inspektorat sebagai penjamin mutu (Quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya.	Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas
----	---	--	---	--

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

#### **E. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis organisasi, sebagai berikut :

Table 2\_ : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	Obrik/SKPD/Kabupaten/Kota/Ikhtisar LHP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai “B” 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai “B”	LHE LKj
3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.	LPPD
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	1. Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan 2. Persentase tindaklanjut Itjend Kemendagri yang dapat diselesaikan. 3. Persentase tindaklanjut Itprov yang dapat diselesaikan.	Ikhtisar LHP
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021



## F. Perjanjian Kinerja

. Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki Perjanjian Kinerja, yang salah satu wujudnya adalah adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan pedoman utama dalam melaksanakan kebijakan pengawasan dan juga tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Perjanjian kinerja tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021. Didalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan beberapa indikator sasaran yang berperan sebagai media untuk menetapkan rencana tingkat capaian.

Pada tahun 2018, anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 APBD Murni sebesar Rp.10.800.000.000 serta APBD setelah Perubahan sebesar Rp. 10.800.000.000 sedangkan untuk Sektor Pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan target-target kinerja yang diperjanjikan dalam Rencana Strategis melalui 3 program strategis dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 7,981,819,100.00 ,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), dijabarkan dengan matrik sebagai berikut:

**Table 2** : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%
		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	88%



II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	65%
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	27%
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	45%
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	87%
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	90%
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	80%

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.348.913.900
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.950.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.674.000
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.799.848.100

6.	Program Peningkatan Profesionalisme dan Aparatur Pengawasan	588.496.000
7.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	171.118.000
<b>JUMLAH</b>		<b>10.800.000.000</b>

**Sasaran Pertama** berupa Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Untuk sasaran yang pertama kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

**Sasaran Kedua** berupa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten/Kota, Untuk sasaran yang kedua kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

**Sasaran Ketiga** berupa Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya persentase kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah minimal "Sangat Tinggi". Untuk sasaran yang ketiga kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

**Sasaran Keempat** berupa Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional. Kondisi ini ditandai dengan persentase penyelesaian tindaklanjut BPK, Itjend, Inspektorat Provinsi yang selesai. Untuk sasaran yang keempat kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.

**Sasaran Kelima** berupa Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kondisi ini ditandai dengan adanya peningkatan persentase jumlah pemeriksa serta APIP yang telah mengikuti diklat sertifikasi JFA dan P2UPD maupun diklat yang terkait dengan bidang pengawasan. Untuk sasaran yang kelima kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berupa kegiatan :

1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Adapun Perencanaan Pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 5 tahun dari tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	OBRIK	TAHUN						JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	SKPD	45	45	45	45	43	43	266
2.	KASUS	61	74	92	21	34	34	316
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	66
<b>JUMLAH</b>		<b>117</b>	<b>130</b>	<b>148</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>648</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

#### I. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

**Sasaran Pertama** berupa Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Untuk sasaran yang pertama kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan sasaran outcome adalah terwujudnya peningkatan kinerja Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terhadap kegiatan ini telah ditetapkan indikator sasaran berupa objek pemeriksaan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Rencana tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator tersebut adalah 43 Pemeriksaan Reguler Provinsi dan 11 Pemeriksaan Reguler di Kabupaten/Kota

dalam Provinsi Jambi, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ditambah dengan pemeriksaan serentak (Stock Kas Opname), review laporan keuangan, review atas laporan Pemda, review pengadaan barang & Jasa, Review RKA Murni, review tender Pra DIPA Perda APBD TH. 2018, EKPPD dan Evaluasi LKj OPD dan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja Keuangan dan Aset yang keseluruhannya adalah 54 objek pemeriksaan.

Secara Teknis sasaran pemeriksaan pada Tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman kepada Program Kerja Pengawasan Tahun 2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 110/Kep.Gub/INSPEKTORAT/2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Capaian Sasaran Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	43 LHP	43 LHP	100%
2.	Review Laporan Keuangan	1 LHR	1 LHR	100%
3.	Evaluasi LKj SKPD Provinsi Jambi	43 LHP	43 LHP	100%
4.	Evaluasi LKj Kab/Kota	4 LHE	4 LHE	100%
5.	Evaluasi LPPD Kab/Kota	11 LHE	11 LHE	100%
6.	Evaluasi Penilaian Kinerja	4 LHE	4 LHE	100%
7.	Reguler SKPD Pemprov Jambi	43 LHP	38 LHP	88%
8.	Reguler Kabupaten/Kota	11 LHP	11 LHP	100%
9.	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	20 LHP	17 LHP	85%
10.	Review Laporan Kinerja Daerah	1 LHR	1 LHR	100%
11.	Review RKA Murni/Perubahan	2 LHR	2 LHR	100%
12.	Review Tender Pra DIPA Perda APBD Tahun 2018.	3 LHR	3 LHR	100%
13.	Review Penyerapan Anggaran, PBJ dan P3DN	4 LHR	4 LHR	100%

14.	Review RPJMD	1 LHR	1 LHR	100%
15.	Review RKPD	1 LHR	1 LHR	100%
16.	Review Renja dan KUA-PPAS	1 LHR	1 LHR	100%
17.	Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah (Kab. Merangin, Kota Jambi)	2 LHP	2 LHP	100%
<b>Jumlah</b>		<b>195</b>	<b>187</b>	<b>96 %</b>

Sedangkan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP pada 43 OPD dapat dilihat bahwa Persentase tingkat capaian Laporan Keuangan atas Review Laporan Keuangan OPD dari target 100% telah tercapai sebesar 100%. dan Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi dari target 88 %, tercapai sebesar 82%. dapat dilihat dengan target persentase kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP	100%	100%	100%
2.	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	88%	82%	93%

**Sasaran Kedua** berupa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dan Kabupaten/Kota, Untuk sasaran yang kedua kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya persentase OPD yang akuntabilitasnya baik serta meningkatnya persentase Kabupaten/Kota yang akuntabilitasnya baik. Untuk sasaran yang ketiga kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Bentuk dari kegiatan ini adalah Evaluasi Laporan Kinerja OPD serta Penilaian OPD yang mana kegiatan dari Program tersebut di 43 (empat puluh tiga) OPD dalam Provinsi Jambi. Bahwa dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa realisasi dari 43 OPD yang mendapat kategori nilai “BB” (Sangat Baik) sebanyak 1 OPD, kategori nilai “B” (Baik) sebanyak 2 OPD sedangkan yang mendapat Kategori “CC” (Cukup) sebanyak 8 OPD serta yang mendapat Kategori “C” (Kurang) sebanyak 16 OPD dan yang mendapat Kategori “D” sebanyak 13 OPD. Dari hasil penilaian diatas bahwa Persentase tingkat capaian kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja OPD dari target 65 persen adalah sebesar 7 persen, dan dari hasil Evaluasi Laporan Kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dari 4 Kabupaten/Kota yang mendapat kategori nilai “A” sebanyak 0 Kab/Kota, sedangkan yang mendapat Kategori nilai “B” (baik) sebanyak 4 Kab/Kota, dan yang mendapat Kategori “CC” (Cukup) sebanyak 0 Kab/Kota serta yang mendapat Kategori “C” (Kurang) sejumlah 0 Kab/Kota. Dari hasil penilaian diatas bahwa Persentase tingkat capaian kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja pada 4 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai “B” (Baik) dari target 27% adalah sebesar 36%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 133% yang dikarenakan dari 4 Kab/Kota yang di evaluasi mendapat nilai “B”. Untuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Kab/Kota, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Evaluasi Kinerja Terhadap 4 Kab/Kota yaitu : Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.

Terhadap kegiatan ini telah dilaksanakan 1 Kali Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja sebanyak 43 OPD Provinsi Jambi serta Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja pada 4 Kab/Kota terhadap beberapa program strategis Pemerintah Provinsi Jambi yang meliputi Program/Kegiatan yang ada di dalam Provinsi Jambi sebagaimana tabel berikut :

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Evaluasi LKj SKPD	1 LHE	1 LHE	100%
2.	Evaluasi LKj Kab/Kota	4 LHE	4 LHE	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>5 LHE</b>	<b>5 LHE</b>	<b>100 %</b>



dan dengan target persentase perjanjian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai “ B “	65%	7%	11%
2.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai “ B “	27%	36%	133%

**Sasaran Ketiga** berupa Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya persentase kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah minimal “Sangat Tinggi”. Untuk sasaran yang ketiga kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dari hasil penilaian diatas bahwa Persentase tingkat capaian kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 11 Kabupaten/Kota dari target 45% adalah sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat sebesar 278%.

Capaian Sasaran Laporan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota	11 LHE	11 LHE	100 %
Jumlah		11	11	100 %

dan dengan target persentase kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “ Sangat Tinggi (ST)”	45%	100%	278%

**Sasaran Keempat** berupa Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional. Kondisi ini ditandai dengan Meningkatnya persentase penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan. Untuk sasaran yang kelima kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH berupa Kegiatan Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan, dimana indikator kinerja dari kegiatan ini adalah Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Itjen Kemendagri, dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2018.

Kegiatan utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berupa pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut termasuk dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.799.848.100 dan terealisasi sebesar Rp. 6.294.538.491 atau 92,57%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeriksaan/pembinaan terhadap 214 Objek Pemeriksaan (Obrik) dengan 197 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 92,06% dari target yang telah rencanakan sebelumnya. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018

No.	Uraian	Pelaksanaan	Realisasi	
			Obrik	LHP
1.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	Desember	43	43
2.	Review Laporan Keuangan	Maret	1	1
3.	Evaluasi LKj SKPD Provinsi Jambi	Mei	43	43
4.	Evaluasi LKj Kab/Kota	Oktober	4	4
5.	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Mei	11	11
6.	Evaluasi Penilaian Kinerja	Maret	4	4
7.	Reguler SKPD Pemprov Jambi	Juni, Juli	43	38
8.	Reguler Kabupaten/Kota	Juli	11	11
9.	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Maret, April	30	17
11.	Review Laporan Kinerja Daerah	Maret	1	1
12.	Review RKA Murni/Perubahan	September	2	2
13.	Review Tender Pra DIPA Perda APBD Tahun 2018.	Januari	3	3

14.	Reviu Penyerapan Anggaran, PBJ dan P3DN	Feb, Apr, Mei	4	4
15.	Reviu RPJMD	Maret	1	1
16.	Reviu RKPD	Mei	1	1
17.	Reviu Renja dan KUA-PPAS	Mei	1	1
18.	Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah (Kab. Merangin, Kota Jambi)	Juli, Okt	2	2
Jumlah			205	187

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diupayakan penyelesaiannya.

Adapun progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan regular di 21 (dua puluh satu) OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 362 dengan 587 rekomendasi dari jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 536 rekomendasi atau 91,31 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 15 rekomendasi atau 2,56 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 34 rekomendasi atau 5,79 persen. Sedangkan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian daerah sebesar Rp.2.501.558.871,52 dan telah disetor sebesar Rp. 296.392.074,41 atau 11,85 persen, masih sisa sebesar Rp.2.205.166.797,11 atau 88,15 persen.

Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 keadaan Januari 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

## REKAPITULASI TLHP PEMERIKSAAN ITPROV JAMBI PADA SKPD PROVINSI JAMBI

TAHUN 2016 KEADAAN JANUARI 2019

No.	SKPD	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			Sisa Belum Selesai	Kerugian Negara		
				S	D	B		Nilai (Rp)	Disetor (Rp)	Sisa (Rp)
1	Dinas Perhubungan	11	20	20	0	0	0	Rp 27,475,416.03	Rp 27,475,416.03	Rp -
2	BLHD	7	10	10	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
3	Satpol PP	8	13	13	0	0	0	Rp 486,125.00	Rp 486,125.00	Rp -
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	19	24	24	0	0	0	Rp 5,768,865.00	Rp 5,768,865.00	Rp -
5	Sekretariat Bakorluh	4	5	5	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
6	Disbudpar	30	47	46	0	0	0	Rp 107,933,241.00	Rp 107,933,241.00	Rp -
7	Dinas ESDM	8	13	13	0	0	0	Rp 2,350,000.00	Rp 2,350,000.00	Rp -
8	Dinas Pendidikan	31	47	47	0	0	0	Rp 37,590,000.00	Rp 37,590,000.00	Rp -
9	Sekretariat DPRD	11	20	20	0	0	0	Rp 19,273,534.20	Rp 19,273,534.20	Rp -
10	Set.Pemprov (Biro-biro)	55	95	95	0	0	0	Rp 13,288,082.76	Rp 13,288,082.76	Rp -
11	Dinas Perkebunan	28	52	39	11	2	13	Rp 23,834,600.00	Rp -	Rp 23,834,600.00
12	Dinas Pekerjaan Umum	18	32	0	0	32	32	Rp 197,159,014.53		Rp 197,159,014.53
13	RSUD Rd. Mattaher	15	21	21	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
14	Dinas Sosnakertrans	17	19	17	2	0	0	Rp 4,603,344.80	Rp -	Rp 4,603,344.80
15	BPMP	16	24	24	0	0	0	Rp 1,037,376.00	Rp 1,037,376.00	Rp -
16	BPPD	7	11	11	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
17	RSJD	9	14	13	1	0	0	Rp 2,015,185,354.81	Rp 39,912,483.81	Rp 1,975,272,871.00
18	Disperindag	9	14	13	0	0	0	Rp 1,200,000.00	Rp -	Rp 1,200,000.00
19	Dinas Kesehatan	23	40	40	0	0	0	Rp 12,559,252.00	Rp 12,559,252.00	Rp -
20	Dinas Pertanian	18	35	34	1	0	0	Rp 18,017,195.39	Rp 14,920,228.61	Rp 3,096,966.78
21	Dinas Kehutanan	18	31	31	0	0	0	Rp 13,797,470.00	Rp 13,797,470.00	Rp -
JUMLAH		362	587	536	15	34	45	Rp 2,501,558,871.52	Rp 286,392,074.41	Rp 2,205,166,797.11

Sedangkan pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan regular di 22 (dua puluh dua) OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 302 dengan 471 rekomendasi dari jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 357 rekomendasi atau 75,80 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 8 rekomendasi atau 2,24 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 106 rekomendasi atau 29,69 persen. Sedangkan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian daerah sebesar Rp.224.409.278,- dan telah disetor sebesar Rp. 207.756.013 atau 92,58 persen, masih sisa sebesar Rp.16.653.265 atau 7,42 persen.



Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 keadaan Januari 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI TLHP PEMERIKSAAN ITPROV JAMBI PADA OPD PROVINSI JAMBI										
TAHUN 2017 KEADAAN JANUARI 2019										
No.	SKPD	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			Sisa belum selesai	Kerugian Negara		
				Selesai	Dalam Proses	Belum Di TL		Nilai (Rp)	Disetor (Rp)	Sisa (Rp)
1	Balitbangda	8	15	15	0	0	0	Rp 5,360,750	Rp 5,360,750	Rp -
2	Disbudpar	26	37	37	0	0	0	Rp 48,064,000	Rp 48,064,000	Rp -
3	Dinas Perhubungan	16	21	21	0	0	0	Rp 21,261,380	Rp 21,261,380	Rp -
4	BKD	25	44	31	8	5	13	Rp -	Rp -	Rp -
5	Dinas Kominfo Daerah	13	24	24	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
6	BPPD	20	27	27	0	0	0	Rp 8,132,480	Rp 8,132,480	Rp -
7	Dinas Kesehatan	23	35	35	0	0	0	Rp 16,264,960	Rp 16,264,960	Rp -
8	Dinas Kehutanan	11	18	0	0	18	18	Rp 4,805,285	Rp -	Rp 4,805,285
9	Diperta Hi & Peternakan	14	24	24	0	0	0	Rp 10,473,000	Rp 10,473,000	Rp -
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	19	19	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
11	Dinas PMD dan PTSP	13	18	18	0	0	0	Rp 70,128,374	Rp 70,128,374	Rp -
12	Sekretariat DPRD	7	12	0	0	12	12	Rp -	Rp -	Rp -
13	Dinasos DUKAPIL	12	20	0	0	20	20	Rp 2,148,000	Rp -	Rp 2,148,000
14	Dinas Perkebunan	11	22	0	0	22	22	Rp 6,535,000	Rp 6,535,000	Rp -
15	Dinas ESDM	11	15	0	0	15	15	Rp -	Rp -	Rp -
16	Dispora	11	17	17	0	0	0	Rp 4,850,000	Rp -	Rp 4,850,000
17	Dinas Koperasi & UMKM	14	25	25	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
18	Dinas Lingkungan Hidup	7	8	8	0	0	0	Rp 2,175,275	Rp 2,175,275	Rp -
19	Badan Kesbangpol	7	11	11	0	0	0	Rp 3,161,488	Rp 3,161,488	Rp -
20	Bappeda	11	14	0	0	14	14	Rp 4,850,000	Rp -	Rp 4,850,000
21	Dinas PP, P.M dan KB	4	8	8	0	0	0	Rp 14,457,000	Rp 14,457,000	Rp -
22	DKP	28	37	37	0	0	0	Rp 1,742,306	Rp 1,742,306	Rp -
JUMLAH		302	471	357	8	106	114	Rp 224,409,278	Rp 207,756,013	Rp 16,653,265

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2016 s.d tahun 2017 sebanyak 52 temuan dengan 75 rekomendasi telah selesai 100% ditindaklanjuti. Dan Hasil Pemeriksaan di Tahun 2018 terhadap 7 urusan bidang pengawasan dengan temuan sebanyak 14 dengan 31 rekomendasi juga telah selesai 100% ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2002-2017 sebanyak 702 temuan dengan 1601 rekomendasi terdiri dari Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi, Pemeriksaan Bantuan Parpol, Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pemeriksaan atas dana perimbangan, Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja RSUD, Pemeriksaan Pendapatan, Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas, Pemeriksaan Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambi sapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort, Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi serta Pemeriksaan atas operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 dan Pemeriksaan atas Pengolahan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 serta Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Aktual TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III Tahun 2015), Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pemeriksaan LKPD TA 2015 dan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja pada Provinsi Jambi TA 2016 serta Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada Provinsi Jambi TA 2016, Pemeriksaan LKPD TA 2016 serta Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah pada Provinsi Jambi TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pemeriksaan LKPD TA 2017 dan PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA. 2018.

Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2018.

No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomen dasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tahun 2006</b>		<b>45</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
<b>Tahun 2007</b>		<b>57</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0



No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tahun 2008</b>		<b>76</b>	<b>195</b>	<b>188</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja RSUD Tahun Mattaher TA 2008	19	70	65	5	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
<b>Tahun 2009</b>		<b>43</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
<b>Tahun 2010</b>		<b>55</b>	<b>125</b>	<b>109</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	15	6	9	0	0
23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	27	2	0	0
<b>Tahun 2011</b>		<b>47</b>	<b>113</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	43	13	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0
26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	20	4	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d 30 Juni 2011) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0





Tahun 2012		40	81	57	24	0	0
28	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	28	13	0	0
29	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
30	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2012 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
Tahun 2013		76	214	145	28	41	0
31	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	59	19	4	0
32	Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	40	8	1	0
33	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
34	Pemeriksaan atas Operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
35	Pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan dan Review LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
Tahun 2014		25	54	35	13	6	0
36	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
37	Pemeriksaan atas Pengolahan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	
Tahun 2015		43	96	32	33	31	0
38	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	20	12	0
39	Pemeriksaan atas Pengolahan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	6	7	7	0
40	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP berbasis aktual TA 2014 dan 2015 (s.d triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
41	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	12	6	2	0
Tahun 2016		32	91	34	43	14	0
42	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
43	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	3	17	7	0
44	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada Provinsi Jambi TA 2016	7	14	2	11	1	0
Tahun 2017		23	56	31	18	7	0
45	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
46	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA. 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi.	6	12	8	2	2	0
Tahun 2018		19	63	19	32	12	0
47	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	51	19	32	0	0
48	PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA. 2018	5	12	0	0	12	0
TOTAL		702	1601	1194	250	157	0

Dari tabel diatas dapat dipersentasekan Penyelesaian s.d Desember 2018 sebagai berikut :

- Selesai	= 74,58 % = (75%)
- Belum Selesai/Dalam Proses Ditindaklanjuti	= 15,62 %
- Belum Ditindaklanjuti	= 9,81 %
Total	= 100%

Realisasi tingkat capaian diatas dapat disimpulkan pada target persentase perjanjian kinerja sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	87%	75%	86%
2.	Persentase tindaklanjut Itjend yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
3.	Persentase tindaklanjut Itprov yang dapat diselesaikan	90%	88%	98%

**Sasaran Kelima** berupa Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kondisi ini ditandai dengan adanya persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat. Untuk sasaran yang kelima kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berupa Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

**Tabel I : Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	80%	80%	100%

**Kegiatan Pertama** adalah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Adapun wujud dari kegiatan ini adalah pengiriman tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan Pembentukan Auditor dan Impassing P2UPD serta Diklat Subtansi/Diklat Teknis sebagaimana table berikut :

**Tabel 2. Jenis Pendidikan Teknis / Fungsional**

NO	TINGKAT DAN JENIS PENDIDIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pembentukan Auditor	12	12	100 %
2.	Impassing P2UPD	18	18	100 %
3.	Diklat Teknis	13	13	100 %
	<i>J u m l a h</i>	43	43	100 %

Dari *tabel 2* dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan mengikutsertakan APIP dalam pendidikan dan pelatihan teknis adalah 100 %, hal ini terlihat pada jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi auditor sebanyak 35 orang dan yang telah mengikuti diklat pembentukan auditor ditahun 2018 sebanyak 12 orang yang terdiri dari Pembentukan Auditor Pertama sebanyak 11 orang dan Auditor Madya sebanyak 1 orang, dan juga yang telah mengikuti Impassing P2UPD sebanyak 18 orang, serta yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 13 orang dan telah memenuhi target awal kinerja serta diklat teknis yang juga telah memenuhi target awal kinerja, dan saat ini Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki 22 Orang Pejabat P2UPD.

**Kegiatan Kedua** adalah Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Dengan bentuk kegiatan adalah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), Workshop/Lokakarya dll sebagaimana table berikut :

**Tabel 3. Jenis Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan**

NO	TINGKAT DAN JENIS PENDIDIKAN	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)/Wokshop/Loka Karya/Bintek	3 kali	3 kali	100 %
	<i>Jumlah</i>	3 kali	3 kali	100 %

Dari table 3 tersebut terlihat bahwa antara rencana target kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Kegiatan Workshop/Loka Karya dll telah tercapai 100 %.

#### I. Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 dan beberapa Tahun Terakhir.

Jika dianalisa Realisasi dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2018 dibandingkan realisasi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2017 sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

NO.	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%
	- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	88%	82%	82%	82%
	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	65%	7%	63%	9%
	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	27%	36%	18%	0%
	- Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal " Sangat Tinggi "	45%	100%	36%	100%

- Persentase tindak lanjut selesai				
- BPK	87%	75%	85%	79%
- Itjend Kemendagri	100%	100%	100%	100%
- Inspektorat Provinsi	90%	88%	90%	88%
- Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	80%	80%	70%	70%

### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat secara umum pada tabel berikut :

## **II. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program seperti disampaikan, masih terdapat hambatan, kendala dan keterbatasan-keterbatasan untuk mencapai kinerja secara maksimal. Dari hasil evaluasi kinerja, kegiatan pemeriksaan reguler baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pemeriksaan kasus-kasus pengaduan masyarakat Walaupun secara umum sudah baik namun khusus masalah pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dirasa perlu untuk diambil upaya-upaya penyelesaian yang lebih tepat.

*Strategi kebijakan;* diperlukan suatu kebijakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal kegiatan pemeriksaan reguler dititikberatkan pada realisasi penerbitan LHP sehingga tujuan dan sasaran tercapai secara hemat, efisien dan efektif selain itu yang paling utama adalah adanya efek positif terhadap auditee sebagai dampak dari suatu hasil pembinaan/pengawasan.

*Strategi Program;* untuk melihat dan mengevaluasi seberapa jauh kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan APFP serta tindaklanjut hasil pengawasan oleh Instansi-instansi diperlukan *Gelar Pengawasan Daerah dan Temu Karya Pengawasan* yang lebih intensif disamping *Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan dan juga study komperatif dengan lembaga yang lebih baik.*

Dalam pemutakhiran data dilakukan serangkaian kegiatan :

1. Melakukan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang mempunyai nilai saldo serta kasus-kasus penyimpangan.
2. Memanggil / menghubungi penanggungjawab satker/proyek dan pihak lain yang secara langsung mempunyai kaitan dengan hasil pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindak lanjut.

## J. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 meliputi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa APBD Murni dari anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. Rp.20.477.175.101,00 dan APBD Perubahan dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 21.740.684.137,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 realisasinya sebesar Rp.19.272.926.355 atau 88,65% dari anggaran.

Adapun rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagai berikut :

URAIAN/PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
<b>Belanja</b>			<b>21.740.684.137</b>	<b>19.272.926.355</b>	<b>88,65</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			<b>10.940.684.137</b>	<b>9.325.494.112</b>	<b>85,24</b>
<b>Belanja Langsung</b>			<b>10.800.000.000</b>	<b>9.947.432.243</b>	<b>92,11</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.600.000	6.100.500	92,43
		2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	219.600.000	187.858.470	85,55
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.060.000	3.060.000	100
		4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0	0	0,00
		5. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	336.364.000	312.332.510	92,86
		6. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	137.538.800	137.538.800	100
		7. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.780.200	25.780.200	100
		8. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	83.392.500	83.372.500	99,98
		9. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.478.400	59.101.750	94,60



URAIAN/PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
		10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.864.500	16.864.500	100
		11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.524.000	13.524.000	100
		12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.500.000	22.043.800	57,26
		13. Penyediaan Makanan dan Minuman	145.000.000	107.269.000	73,98
		14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1.260.211.500	1.253.628.730	99,48
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	25.000.000	21.300.700
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	110.350.000	100.243.500	90,84
		Kegiatan Pengadaan Mebeleur	85.500.000	47.220.000	55,23
		Kegiatan Pengadaan Komputer	186.500.000	179.255.000	96,12
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	291.900.000	291.880.000	99,99
		20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	67.500.000	55.979.000	82,93
		21. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	24.200.000	2.748.000	11,36
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.000.000	64.790.000	98,17
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.674.000	33.150.000	95,60





URAIAN/PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	24. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.035.864.000	2.016.325.091	99,04
		25. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	161.776.000	138.692.600	85,73
		26. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.792.200.000	1.778.703.777	99,25
		27. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	48.105.000	35.845.000	74,51
		28. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	934.513.900	921.370.429	98,59
		29. Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2018.	621.963.000	453.666.400	72,94
		30. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	167.025.200	157.319.600	94,19
		31. Kegiatan Saber Pungli	1.038.401.000	792.615.594	76,33
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	32. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	468.662.000	440.931.392	94,08
		33. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	119.834.000	34.234.000	28,57
7.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	34. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	171.118.000	152.687.400	89,23

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. TINJAUAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja umumnya pelaksanaan kegiatan dan program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dikategorikan dalam *kategori Baik*.

#### B. TINJAUAN KHUSUS

Pada Tahun Anggaran 2018, Terhadap Hasil Penilaian Akuntabilitas Provinsi Jambi belum mampu mencapai akuntabilitas kinerja dalam kategori ***baik***. Untuk itu sangat diperlukan beberapa upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pada beberapa kegiatan, khususnya dalam penerbitan laporan hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kasus pengaduan masyarakat dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (*outcomes*).

#### C. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya pencapaian kinerja yang maksimal dan meminimalisasi *deviasi* nilai capaian kinerja; realisasi penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan diharapkan menjadi perhatian utama dengan penetapan beberapa kebijakan, disamping mempertahankan standar kerja.

Jambi, Januari 2019

**INSPEKTUR,**

**Dr. H. KAILANI, SH, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601023 198902 1 001

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI										CAPAIAN HINGGA 31 DES 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	-	-	-	-	75%	75%	82%	82%	88%	82%	82%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai “B”	85%	57%	90%	59%	61%	13%	63%	9%	65%	7%	7%
		- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai “B”	-	-	-	-	9%	0%	18%	0%	27%	36%	36%
3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	- Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”	-	-	-	-	27%	91%	36%	100%	45%	100%	100%

4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Persentase Tindak Lanjut Selesai :											
		- BPK	80%	77%	90%	82%	82%	80%	85%	79%	87%	75%	75%
		- Itjend Kemendagri	80%	63%	90%	63%	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Inspektorat Daerah Provinsi	80%	83%	90%	35%	88%	80%	90%	88%	90%	88%	88%
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	75%	75%	80%	80%	44%	44%	70%	70%	80%	80%	80%

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

---

1. Nama Unit Kerja : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Tugas :  
Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Daerah.
3. Fungsi :
- a) Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah serta lain-lain yang ditugaskan Gubernur.
  - b) Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi atas petunjuk Gubernur.
  - c) Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, BUMD, Kekayaan Negara dan Daerah.
  - d) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

### **4. Indikator Kinerja Utama**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>IKU</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan Keuangan SKPD sesuai SAP. 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi.	Obrik/SKPD/Kabupaten/Kota/Ikhtisar LHP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B". 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B".	LHE LKj, LHE

3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi " (ST).	LHE LPPD
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Persentase Tindak Lanjut Selesai : 1. BPK 2. Itjend Kemendagri 3. Inspektorat Provinsi	Ikhtisar LHP
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	DUK

Jambi,

2017

**INSPEKTUR,**



**KAILANI, SH, M. Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601023 198902 1 001